BAB II

PROFIL PERUSAHAAN ATAU INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat BAPPEDA Kota Bandung

Pada tahun 1969 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu badan yang menangani pembangunan di daerah yang disebut Badan Perancang Pembangunan Daerah (BAPPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan *Surat Keputusan Gubernur No 163 tahun 1969 tertanggal 16 Agustus 1969*, dan badan ini merupakan embrio dari Badan Pembangunan di Daerah Jawa Barat

Pada tahun 1972, Jawa Barat telah menyempurnakan badan perencanaan yang disebut Badan Perancang Pembangunan Kotamadya yang disebut BAPPEMKO untuk Kotamadya dan BAPPEMKA untuk Kabupaten

BAPPEMKO merupakan Badan Perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat Regional dan Lokal dan ditetapkan dengan *Surat Ketetapan Gubernur Propinsi Jawa Barat No 43 tahun 1972*. Setelah berjalan dua tahun kedudukan Badan Perencana Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakuai dengan *Surat Keputusan Presiden No 15 tahun 1974*, walaupun baru sampai Daerah Tingkat I, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih tetap berlaku Surat Keputusan Gubernur.

Kemudian dengan *Surat Keputusan No 27 Tahun 1980* Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional dengan SK Presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan Daerah Tingkat I atau BAPPEDA Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya *Surat Keputusan No 27 tahun 80*, yaitu :

a. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.
b. Untuk menjamin lajunya perkembangan keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah serta terpadu

Pembentukan BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan *Perda No 21 tahun 1981, Perda No 24 tahun 1981*. Seiring dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang pembangunan daerah, maka pemerintah kota Bandung menata kembali struktur organisasi perangkat daerah. BAPPEDA sebagai salah satu

unsur organisasi perangkat daerah juga menata kembali struktur organisasinya termasuk merubah nama BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi BAPPEDA kota Bandung. Hal ini ditetapkan dengan *Perda kota Bandung No 02 tahun 2001* tentang kewenangan daerah kota Bandung sebagai daerah otonomi, untuk struktur organisasi ditetapkan dengan *Perda No 06 tahun 2001* tentang pembentukkan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah kota Bandung, sedangkan untuk uraian tugas dan fungsi ditetapkan dengan *Perda No 17 tahun 2001* tentang perincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi lembaga teknis kota Bandung.

2.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Bandung dan Struktur Organisasi Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Struktur organisasi menggambarkan posisi manajemen berdasarkan tingkatannya dan membantu penetapan batas wewenang dan tanggung jawab dari masing–masing pegawai, sehingga aktifitas dalam perusahaan menjadi terkoordinir dan jelas

Berdasarkan peraturan daerah kota Bandung No 06 tahun 2001 struktur organisasi dan uraian tugas BAPPEDA pasal 4 terdiri dari :

Kepala BAPPEDA mengepalai :

1. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub Bagian Kepegawaian
2. Bidang Data Statistik membawahi :
   a. Sub Bidang Data
   b. Sub Bidang Statistik
   c. Sub Bidang Analisis dan Penilaian
   d. Sub Bidang Pelaporan
3. Bidang Perencanaan membawahi :
   a. Sub Bidang Perindag dan Koperasi
   b. Sub Bidang Pariwisata
   c. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
   d. Sub Bidang Pertanian

4. Bidang Perencanaan Sosial Budaya membawahi :
    a. Sub Bidang Kependudukan
    b. Sub Bidang Pemerintahan
    c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
    d. Sub Bidang Pendidikan
5. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana membawahi :
    a. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan
    b. Sub Bidang Perhubungan
    c. Sub Bidang Lingkungan Hidup
    d. Sub Bidang Sarana dan Prasarana
6. Kelompok Jabatan Fungsional

    Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang tidak terstruktural dan mempunyai keahlian yang spesifik yang terdiri dari :

    1. Widia Iswara (pengajar)
    2. Perencana
    3. Peneliti
    4. Arsiparis (orang yang mengarsipkan surat)
    5. Pustakawan

Penulis melaksanakan praktek kerja pada bidang Sosial Budaya, adapun struktur organisasinya sebagi berikut :

Kepala BAPPEDA membawahi :

1. Sekretariat yang membawahi beberapa bidang
2. Kepala Bagian Sosial Budaya membawahi :
    a. Sub Bidang Kependudukan

        Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan Sosial dan Budaya di bidang perencanaan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera
    b. Sub Bidang pemerintah

        Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan sosial dan budaya dibidang pembangunan pemerintah, komunikasi dan media masa

c. Sub Bidang kesejahteraan rakyat

Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan sosial dan budaya dibidang perencanaan kesejahteraan rakyat dan kesehatan

d. Sub Bidang pendidikan

Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan sosial dan budaya dibidang pendidikan, pemuda, olahraga dan agama

2.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA kota Bandung

Berdasarkan keputusan *Walikota Bandung No 328 tahun 2001* uraian Tugas Pokok yang diemban oleh setiap bagian pada struktur organisasi BAPPEDA antara lain :

1. BAPPEDA

   Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah kota dibidang perencanaan pembangunan daerah

2. Sekretariat

   Sekretariat BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan dibidang kesekretariatan badan perencanaan pembangunan daerah.

3. Kepala Bidang Sosial Budaya

   Bidang sosial budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan di bidang data dan statisik pembangunan

   a. Sub Bidang kependudukan
   b. Sub Bidang pemerintahan
   c. Sub Bidang kesejahteraan rakyat
   d. Sub Bidang pendidikan

2.4 Fungsi BAPPEDA

a. Perumusan kebijakan umum bidang perencanaan pembangunan daerah
b. Pelaksanaan perencanan dan pengendalian pembangunan daerah yang meliputi data dan statitik, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial budaya, serta perencanaan fisik dan prasarana

c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian badan

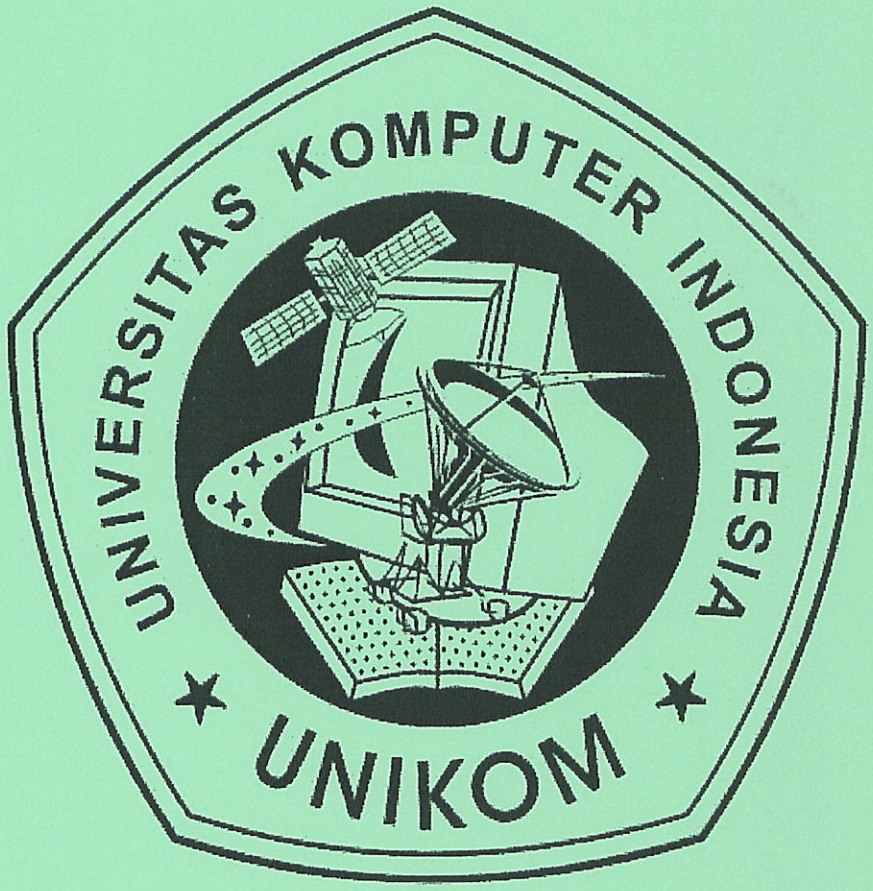
2.5 Visi dan Misi BAPPEDA

A. VISI

BAPPEDA kota Bandung sebagai badan perencana terbaik di propinsi Jawa Barat tahun 2010

B. MISI

1. Meningkatkan kualitas produk perencanaan yang implementatif sebagai dewan pembangunan seluruh segmentasi masyarakat
2. Membangun organisasi yang efektif dan efisien
3. Memberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia aparatur
4. Maksimalkan prasarana dan sarana pendukung
5. Melibatkan segenap segmentasi atau kelompok masyarakat secara aktif dalam setiap proses perencanan (paricipatory planning).


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM